

ABSTRAK

Wilayah hulu Sungai Bengawan Solo yang berada di Kabupaten Wonogiri mempunyai sumber daya alam berupa sumber daya lahan, air, biologi, rekreasi dan historis yang tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Wonogiri tetapi juga daerah lainnya. Namun seiring dengan perubahan politik, pertumbuhan penduduk dan ekonomi, muncul beberapa permasalahan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam pada wilayah tersebut seperti penambangan tanpa izin di sekitar sungai, penambangan liar pada kawasan DAS, munculnya alat penangkap ikan tidak selektif dll. Dampak negatif kegiatan diatas serta kurang optimalnya perencanaan/pengelolaan bermuara pada munculnya konflik pemanfaatan seperti konflik antara masyarakat dengan pemerintah pembangunan Waduk Pidekso, konflik antara penambang tanpa izin dengan petani yang kehilangan lahan dan pemerintah, serta konflik di bidang perikanan di Waduk Wonogiri antara nelayan dan pemerintah akibat pelanggaran penangkapan pada kawasan sebagai suaka perikanan dan penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang.

Berdasarkan permasalahan di atas, muncul pertanyaan penelitian terkait bagaimana pemanfaatan sumber daya alam di hulu Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Wonogiri, bagaimana kondisi konflik dan penyelesaiannya serta model perencanaan pada sektor-sektor yang terdapat konflik pemanfaatan di wilayah tersebut, yang juga merupakan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam, FGD, observasi lapangan, kajian dokumen serta pengumpulan informasi berita media maupun jurnal penelitian.

Dari hasil analisis, penelitian menyimpulkan bahwa bahwa untuk wilayah hulu Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Wonogiri, konflik cenderung muncul pada pemanfaatan sumber daya yang tergolong sebagai *common pool goods* (yang aksesnya terbuka, namun pemanfaatannya dapat mengurangi bagian pihak lain) yang pengelolaan yang belum optimal. Konflik yang ada sampai saat ini berbentuk konflik laten dan konflik permukaan, dengan sebagian besar konflik belum diselesaikan sehingga berada pada fase jalan buntu (*stalemate*). Sedangkan untuk konflik yang saat ini telah berhasil diselesaikan (*fase dispute settlement*), masih terdapat ketidakpuasan sebagian pelaku terhadap resolusi konflik yang telah dicapai, meskipun juga terdapat sektor yang resolusi konfliknya dinilai berhasil. Model perencanaan pada sektor-sektor yang berkonflik termasuk dalam tradisi perencanaan pembelajaran sosial (*social learning*) dan reformasi sosial (*social reform*) dengan tingkat partisipasi masyarakat berada pada kategori menginformasikan (*informing*) dan kerjasama (*cooperation*). Penelitian juga menemukan bahwa model perencanaan yang memungkinkan tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi (model pembelajaran sosial) dapat menghasilkan penyelesaian konflik yang lebih baik dengan memberikan alternatif resolusi yang dapat memenuhi kepentingan para pelaku serta memenuhi kriteria keberhasilan resolusi konflik.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perencanaan dan konflik dalam pemanfaatan sumber daya alam di hulu Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Wonogiri, maka disusun rekomendasi bagi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo untuk mengakomodasi keterlibatan masyarakat yang tinggal di wilayah sungai dalam penyusunan perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas PESDM Kabupaten Wonogiri untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat warga pada wilayah pertambangan dalam perencanaan dan pemberian izin kegiatan pertambangan serta Dinas Perikanan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Wonogiri agar menawarkan alternatif substitusi alat tangkap yang lebih sesuai aturan.

KataKunci : Sumber daya alam; konflik; model perencanaan